

## LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR**  
**S E M A R A N G**  
Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
**SEMARANG - 50148**

Nomor : 50 / Rst / 2021  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **HANDRY JHUDISTYRA GOLF**  
NIM : 15.C1.0079  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)**  
**S E M A R A N G**  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur  
Semarang


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 5 Agustus 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ REKRONTUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 5 Agustus 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor  
Semarang  
KETUA

  
**Dr. AGUS RUSIANTO, SH., MH.**  
NIP. 19670422 199212 1 001



**7.89%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**0.26%** IN QUOTES

## Report #14151497

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara, Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dirumuskan dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Hukum tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 89 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada

REPORT CHECKED  
#141514971 DEC 2021, 1:45 PM

AUTHOR  
ANDRE KURNIAWAN

PAGE  
1 OF 63